

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan *principal* (pemilik usaha). Didalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam pendelegasian wewenang ini, pemilik perusahaan mengharapkan pengelolaan perusahaan yang lebih baik oleh agen agar menghasilkan keuntungan lebih (Rankin, 2012).

Namun, adanya pemisahan antara *principal* dan agen dapat menimbulkan *agency conflict* karena perbedaan kepentingan. Pemilik perusahaan berusaha memaksimalkan laba dan dividen dari investasi dalam sebuah perusahaan. Disisi lain, manajer berusaha memaksimalkan keuntungan pribadinya dengan memaksimalkan kompensasi yang diperoleh, meskipun dengan cara yang bertentangan dengan keinginan pemilik perusahaan.

Terdapat tiga macam masalah keagenan. Pertama, masalah keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Kedua, masalah keagenan antara pemegang saham dengan kreditor. Ketiga, masalah keagenan antara perusahaan dengan konsumen (Sari dan Zuhrotun, 2006). Penelitian ini didasari dengan masalah keagenan yang pertama yaitu antara pemegang saham dan manajer.

Teori ini dipilih karena berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam

penelitian ini. Terjadinya asimetri informasi menyebabkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menjadi tidak transparan terhadap pengungkapan informasi perusahaan. Transparansi ini menjadi aspek yang penting dalam *corporate governance* karena dapat merugikan pemegang saham. Dan didalam teori agensi ini disediakan kerangka kerja yang berhubungan dengan pengungkapan dan tata kelola perusahaan (Puspitaningrum dan Atmini, 2012).

2.2 *Corporate Governance*

Corporate governance dilatar belakangi oleh adanya konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan pihak manajemen. Manajer berperan sebagai agen dalam suatu perusahaan dan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan superioritas informasi yang dimiliki oleh manajer, memungkinkan manajer memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham (pemilik) (Miqdad, 2012).

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (www.bpkp.go.id). Menurut Iskander *et al* (1999) dalam Gunarsih (2017), *corporate governance* merupakan kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholder* untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh *return*. Dalam penelitian ini, variabel *Corporate Governance* yang digunakan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Kepemilikan Manajerial

kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham entitas yang dimiliki oleh manajemen entitas. Manajer yang juga merupakan pemegang saham dari entitas, termotivasi untuk meningkatkan nilai entitas serta meningkatkan kekayaan pemegang saham karena juga akan meningkatkan kekayaan para manajer. Oleh karena itu, manajer cenderung menurun perilaku oportunistik. Mekanisme tata kelola yang memiliki kemampuan untuk mengurangi manajemen berperilaku oportunistik dan mengurangi asimetri informasi (Simon dan Wong, 2001).

Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki manajemen atau manajerial, maka semakin besar juga upaya dari manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu kepemilikan manajerial dapat menurunkan biaya agensi yang dilakukan oleh para pemegang saham karena manajemen mampu menyelaraskan antara kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham.

2.2.2 Kepemilikan Institusional

Menurut Nabela (2012) definisi kepemilikan institusional “Merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase”. Menurut Nuraina (2012) Kepemilikan Institusional adalah : “Presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lain”.

Jadi, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain atau lembaga lain dalam sebuah perusahaan. Yang

dimaksud dengan institusi atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, koperasi, Lembaga pemerintah dan kepemilikan institusi lainnya.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Dimana kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan meurunkan nilai perusahaan.

2.2.3 Jumlah Dewan Komisaris independen

Komisaris independen merupakan komisaris yang bukan dari pihak manajemen perusahaan (Puspitaningrum dan Atmini, 2012). Keberadaan komisaris independen sangat penting di dalam perusahaan. Komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang oleh dewan komisaris dalam mengambil keputusan. Komisaris independen mempunyai tugas utama yaitu mendorong adanya penerapan prinsip *good corporate governance* dalam suatu perusahaan dengan melakukan pengawasan.

Teori keagenan menilai bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol segala tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan

Meckling, 1976). Komisaris independen memainkan peran penting dalam memantau proses akuntansi dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan (Kelton dan Yang, 2008).

Besarnya jumlah komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan informasi karena komisaris independen ini dapat mengurangi kesempatan yang dimiliki manajemen untuk menyembunyikan informasi perusahaan.

Sehingga dengan adanya komisaris independen diharapkan perusahaan akan menyampaikan informasi yang lebih luas dan transparan. Dan komisaris independen juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya perusahaan dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan sehingga diharapkan, dapat meningkatkan kepercayaan dalam pengungkapan laporan keuangan termasuk dalam *internet financial reporting*.

2.2.4 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Pertemuan komite audit diadakan karena bertujuan untuk membahas persiapan laporan keuangan serta pengendalian internal perusahaan dan penerapan *corporate governance* yang baik (Puspitaningrum dan Atmini, 2012). Pertemuan komite audit ini biasanya dilakukan antara kedua belah pihak yaitu internal dan eksternal. Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diselenggarakan oleh komite audit, tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya penerapan *good corporate governance*.

Pertemuan audit adalah wadah untuk mempertanggungjawabkan fungsi dari komite audit itu sendiri kepada dewan komisaris dan secara tidak langsung kepada perusahaan. Frekuensi pertemuan audit yang tinggi merupakan salah satu tuntutan komite audit perusahaan dalam mempertanggungjawabkan tugasnya sekaligus memberikan informasi terbaru kepada pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Semakin sering komite audit melakukan rapat, semakin banyak hal yang dievaluasi sehingga dapat menambah keefektifan pengawasan dan penerapan prinsip dalam peningkatan pengungkapan informasi.

2.2.5 Kompetensi Komite Audit

Komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk pada suatu perusahaan dimana para anggotanya dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh dewan komisaris. Biasanya komite audit terdiri dari tiga orang termasuk ketua komite audit. Komite Audit mendukung dewan komisaris dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan, mekanisme pengendalian internal, dan penerapan *good corporate governance*. Selain itu komite audit juga dapat memberikan gagasan profesional dan independennya kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi pada dewan komisaris (Arief, 2009).

Komite audit juga bertanggungjawab kepada dewan komisaris untuk membantu memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan sistem audit di semua lini perusahaan (Rompas *et al*, 2014). Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, komite audit menjunjung prinsip *good corporate governance* dan bertindak secara profesional serta independen

untuk kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan (BAPEPAM, 2006).

Memiliki pengetahuan akan finansial adalah suatu keharusan bagi anggota komite audit. Jika proporsi anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan yang lebih tinggi, kinerja komite audit juga akan lebih tinggi. Hal ini pada saatnya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disiapkan, membatasi perilaku oportunistik manajer, dan meningkatkan pengungkapan sukarela.

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG pada tahun 2006, disebutkan bahwa terdapat tugas komite audit dalam membantu dewan komisaris untuk memastikan :

1. Laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang yaitu :

a. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan telah memberikan gambaran yang sebenarnya

tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen jangka panjang.

b. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usaha dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap peraturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

c. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang pengawasan perusahaan yang termasuk di dalamnya sistem pengendalian internal serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup auditor internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Corporate governance yang efektif adalah yang dapat menjaga keseimbangan dalam mengendalikan perusahaan sehingga penyalahgunaan dapat diminimalkan dan diharapkan hasil yang diperoleh akan maksimal. Mekanisme *corporate governance* yang baik dapat mengurangi biaya agensi yang muncul akibat adanya asimetri informasi. Menurut Adrian (2012:30) *corporate governance* dikatakan baik jika memiliki prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. *Fairness*

Fairness adalah keadilan serta kesetaraan dalam memenuhi hak-hak

pemangku kepentingan yang timbul akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arief, 2009:5). Pihak manajemen harus menekankan prinsip *fairness* (kewajaran) dalam pengungkapan informasi laporan perusahaan agar *shareholder* dapat membuat keputusan yang baik untuk keberlangsungan perusahaan. Prinsip ini lebih ditekankan untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas mengenai kepemilikan dan sistem dari aturan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

b. *Accountability*

Accountability adalah kejelasan suatu fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan ekonomis (Arief, 2009:5). Dalam mengungkapkan informasi, perusahaan harus memberikan laporan perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar nantinya tidak timbul konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan para investor.

c. *Responsibility*

Responsibility adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Arief, 2009:5). Perusahaan harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan manajemen dengan investor yaitu dengan cara menjelaskan peran dan tanggungjawab dari masing-masing pihak dan diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris juga harus memastikan bahwa semua pihak yang terkait mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

d. *Transparency*

Transparency adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan tentang perusahaan (Arief, 2009:4). Pengungkapan informasi yang transparan sangat dibutuhkan oleh para investor untuk membuat keputusan terhadap resiko dan keuntungan dari investasinya. Untuk dapat dikatakan transparan suatu informasi harus memadai, akurat serta tepat waktu dalam pengungkapannya. Prinsip ini merupakan prinsip yang penting dalam *corporate governance* yang kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena pada saat pengambilan keputusan tersebut semua pihak harus mengetahui latar belakang, alasan dan kegunaan dari keputusan yang akan diambil.

Penerapan prinsip *fairness, responsibility, accountability, dan transparency* dalam perusahaan sebaiknya dijadikan sebagai pedoman oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* dengan baik akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala aktivitas bisnis yang dijalankannya dalam menghadapi persaingan usaha. Dengan adanya penerapan prinsip ini perusahaan diharapkan dapat membantu terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan kondusif.

2.3 *Internet Financial Reporting (IFR)*

Internet Financial Reporting adalah pencantuman informasi keuangan perusahaan melalui internet atau website (Lai et al., 2009). *Internet Financial Reporting* merupakan salah satu contoh pengungkapan sukarela (*voluntary*

disclosure). Namun Jenis pengungkapan ini belum diatur secara formal di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Almilia, 2008). Manfaat potensial yang membedakan pelaporan keuangan berbasis internet dengan praktik pengungkapan sukarela lainnya menurut Ashbaugh et al.(1999) adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi biaya penyebaran informasi perusahaan.
2. Wahana komunikasi perusahaan dengan konsumen.
3. Memfasilitasi penyebaran pengungkapan keuangan perusahaan sebagai alat analisis oleh pembuat keputusan.
4. Meningkatkan pengungkapan keuangan perusahaan.

Selain memberikan beberapa keuntungan, menurut Asbaugh et al. (1999) pengungkapan informasi keuangan melalui website perusahaan juga memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut:

1. Biaya untuk membangun serta merawat website terkadang melebihi atas manfaat yang didapat.
2. Sehubungan dengan market competition, dengan diungkapkannya informasi secara luas, perusahaan akan berpotensi kehilangan keunggulan kompetitifnya.

2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan (Nur Sayidah, 2016) *Corporate Governance* dan *Internet Financial Reporting* dengan variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas *corporate governance* terhadap *internet financial reporting* dengan variabel kontrol ukuran

perusahaan dan profitabilitas. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sebanyak 24 perusahaan dengan kriteria terdaftar dalam survei IICG dengan skor CGPI 2012, mempunyai website dan menerbitkan laporan keuangan 2011. Hasil penelitian menunjukkan *internet financial reporting* dipengaruhi oleh kualitas *corporare governance* tetapi tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2018) Analisis Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Pengungkapan *Internet Financial Reporting* pada perusahaan sector keuangan di Bursa efek Indonesia (BEI). Variabel karakteristik yang digunakan yaitu komisaris independen, jumlah rapat komite, kompetensi komite audit, kepemilikan blockholder dan ukuran dewan komisaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independent, jumlah rapat komite, dan kompetensi komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *internet financial reporting* sedangkan kepemilikan blockholder dan ukuran dewan komisaris berpengaruh negative terhadap *internet financial reporting*.

Pada penelitian yang dilakukan Haristito (2014) *Pengaruh corporate governance terhadap internet financial reporting* dengan variable karakteristik struktur kepemilikan, komisaris independen, dan komite audit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mekanisme corporate governance (karakteristik struktur kepemilikan, komisaris independen, dan komite audit) memengaruhi tingkat pengungkapan sukarela *Internet Financial Reporting*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di *Indonesian Stock Exchange (IDX)* pada periode 2013. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Terdapat 34 perusahaan yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara mekanisme *corporate governance*, hanya frekuensi pertemuan komite audit yang memengaruhi *internet financial reporting*.

Pada penelitian yang dilakukan Rachma (2018) Analisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan *internet financial reporting* dengan variabel karakteristik kepemilikan blockholder, ukuran dewan komisaris, jumlah komisiaris independen, kompetensi komite audit dan jumlah rapat komite audit terhadap tingkat pengungkapan *internet financial reporting* (IFR) pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel komisaris independen, jumlah rapat komite audit, kompetensi komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan *internet financial reporting* sedangkan variabel kepemilikan *blockholder* dan ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan *internet financial reporting*.

Penelitian yang dilakukan Kelton dan Yang (2008) meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* pada perilaku *internet financial reporting* perusahaan publik AS. Mereka mengandalkan teori keagenan untuk memprediksi hubungan antara tingkat perilaku pengungkapan Internet perusahaan dan struktur *corporate governance*. Mereka mengukur *corporate governance* dengan hak pemegang saham, struktur kepemilikan, dan komposisi dewan. Secara khusus, mereka mengukur *internet financial reporting* dengan konten pengungkapan, format presentasi, item wajib, pengungkapan sukarela, dan pengungkapan *corporate governance*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan hak-hak pemegang saham yang lemah dan persentase direktur

independen yang lebih tinggi, lebih mungkin untuk terlibat dalam *internet financial reporting*. Menariknya, perusahaan-perusahaan ini juga lebih mungkin untuk memberikan pengungkapan mengenai struktur *corporate* pada *website* perusahaan mereka.

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan porsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Manajer yang sekaligus memiliki saham perusahaan akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan nilai perusahaan termasuk dalam pengungkapan informasi perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki manajemen, maka manajemen termotivasi untuk meningkatkan nilai entitas serta meningkatkan kekayaan pemegang saham karena juga akan meningkatkan kekayaan para manajer itu sendiri. Hal tersebut dapat menurunkan biaya agensi yang dilakukan oleh para pemegang saham karena manajemen mampu menyelaraskan antara kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham.

Kepemilikan manajerial dapat diukur melalui persentase kepemilikan saham oleh manajer yang telah berafiliasi dengan komisaris dan direksi dibagi dengan jumlah total saham yang beredar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh M.Riduan (2013) pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 adalah kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *internet financial reporting*. Oleh karena itu hipotesis pertama yang

diajukan:

H1 : kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap terhadap *internet financial reporting*.

2.5.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi lainnya, Permasari (2010). Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional disebutkan oleh Permasari (2010) profesionalisme dalam analisis informasi yang berdampak pada keterandalan informasi, motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan meurunkan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan Faisal Bayu (2018) pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) kurun waktu 2015- 2017 kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *internet financial reporting*. Oleh karena itu hipotesis kedua yang diajukan:

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting*.

2.5.3 Jumlah Dewan Komisaris Independen

Tujuan dari aktivitas pengawasan oleh dewan komisaris eksternal adalah untuk memberikan signal kepada pasar mengenai reputasi aktivitas pengawasan yang efektif di dalam perusahaan. Semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan, Amrudin (2004).

Besarnya jumlah komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan informasi karena komisaris independen ini dapat mengurangi kesempatan yang dimiliki manajemen untuk menyembunyikan informasi perusahaan.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional atau sebanding dengan jumlah anggota komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris, Kusumaning (2004).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahendra dan Putra (2014) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 hingga 2012 adalah komisaris independen berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pada website perusahaan. Oleh karena itu hipotesis ketiga yang diajukan:

H3 : Jumlah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting*.

2.5.4 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Hubungan empiris antara komite audit dengan fungsi monitoring dijelaskan oleh teori keagenan, yang berpendapat bahwa komite audit independen memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Komite audit melakukan pertemuan dengan kedua pihak internal dan eksternal. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas tentang persiapan laporan keuangan serta pengendalian internal dan penerapan *good corporate governance*. Semakin sering komite audit melakukan rapat, semakin banyak hal yang dievaluasi sehingga dapat menambah keefektifan pengawasan dan penerapan prinsip dalam peningkatan pengungkapan informasi.

Yap et al. (2011) tidak menemukan bukti bahwa frekuensi pertemuan komite audit memengaruhi *internet financial reporting*. Namun Kelton dan Yang (2008) dan Puspitaningrum (2012) menemukan bukti empiris bahwa frekuensi pertemuan komite audit memengaruhi *internet financial reporting* secara positif. Berdasarkan konsep Ho dan Wong (2001), frekuensi pertemuan komite audit melengkapi (komplementer) pengungkapan sukarela termasuk *internet financial reporting*. Oleh karena itu hipotesis keempat yang diajukan:

H4: Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting*.

2.5.5 Kompetensi Komite Audit

Komite Audit mendukung dewan komisaris dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan, mekanisme pengendalian internal, dan penerapan *good corporate governance*. Dalam rangka untuk berfungsi secara efektif, memiliki pengetahuan akan finansial adalah suatu keharusan bagi anggota komite audit. Jika proporsi anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau mengerti tentang keuangan yang lebih tinggi, kinerja komite audit juga akan lebih tinggi. Hal ini pada saatnya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disiapkan, membatasi perilaku oportunistik manajer, dan meningkatkan pengungkapan sukarela.

Puspitaningrum (2012) tidak menemukan bukti bahwa kompetensi komite audit memengaruhi *internet financial reporting*. Namun Kelton dan Yang (2008) menemukan bukti empiris bahwa kompetensi komite audit memengaruhi *internet financial reporting* secara positif. Sejalan dengan konsep Ho dan Wong (2001), kompetensi komite audit melengkapi (komplementer) pengungkapan sukarela termasuk *internet financial reporting*. Oleh karena itu hipotesis kelima yang diajukan:

H5: Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* .